



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**DEPUTI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: [persuratan@kemenpppa.go.id](mailto:persuratan@kemenpppa.go.id)

Nomor : B-060/D.PHP.2/PP.04.02/01/2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan

12 Januari 2023

Yth. Bapak/Ibu  
(daftar terlampir)  
di –  
Jakarta

Dalam rangka Penyusunan Rancangan Permen PPPA tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan akan menyelenggarakan Rapat Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada:

hari/tanggal : Senin, 16 Januari 2023  
waktu : pukul 13.00 WIB - selesai  
tempat : Ruang Rapat Dewi Sartika Lt. 3 Kemen PPPA

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mohon kehadiran Saudara untuk memberikan masukan pada rapat dimaksud. Konfirmasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menghubungi Sdri. Mutia No. HP. 08119990501 dan Sdri. Annisa No. HP. 0856-1157-796.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan,

Ratna Susianawati

Tembusan Yth.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LAMPIRAN UNDANGAN

Nomor : B- 060/D.PHP.2/PP.04.02/01/2023

Tanggal : 12 Januari 2023

**DAFTAR UNDANGAN**

**Kementerian PPPA**

1. Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
2. Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan;
3. Asisten Deputy PHP Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Asisten Deputy PHP dalam Rumah Tangga dan Rentan;
5. Asisten Deputy Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan;
6. Kepala Biro Hukum dan Humas;
7. Asisten Deputy Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat;
8. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
9. JF Madya dan Muda pada Asdep PHP Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. JF Madya dan Muda pada Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan;
11. Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
12. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Asdep Pekerja dan TPPO;
13. Pelaksana Penyusun Rancangan Undang-Undang;

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan,

Ratna Susianawati